

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam strategi pengembangan umum pasar modal Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) disadari salah satu penyebab rentanya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan *Good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut ditandai dengan standar laporan keuangan yang minimal tentang kinerja keuangan perusahaan, khususnya tentang kewajiban utang-piutang tidak ada direktur independen dan diragukannya independensi auditor.

Disamping itu mekanisme yang mendorong perusahaan untuk menaati peraturan dan penegakan hukum masih kurang. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan tidak memadai terutama pada situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Berbagai tulisan telah banyak memaparkan konsekuensi negatif dari *Weak corporate Governance System* dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*.

Iskander dan Chamlou (2000) dalam Hidayah (2010;120) misalnya, menyampaikan bahwa:

krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya corporate governance yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih Under-regulated, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas.

Hal ini berarti bahwa *good corporate governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas berupa pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya pengembangan *good corporate governance* ditujukan untuk mendorong optimalisasi alokasi atau penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan pemilik perusahaan terjaga. Corporate governance pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Masalah ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan. Sutijo (2005) menyebutkan manfaat penerapan Corporate Governance adalah :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Apabila GCG dapat diterapkan dengan baik, maka tidak akan terjadi penyalahgunaan jabatan, sehingga investor merasa aman berinvestasi.
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang sahamnya. Peningkatan nilai perusahaan ditandai dengan meningkatnya nilai modal sendiri. Semakin tinggi nilai modal, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Peningkatan nilai modal, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur untuk menanamkan dananya ke perusahaan.

Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan resources perusahaan sepenuhnya ada di tangan para eksekutif. Salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajemen adalah tingkat pengungkapan informasi terhadap stakeholders.

Banyak penelitian mengenai isu pengungkapan. Berdasarkan jenis-jenis pengungkapan, penelitian sebelumnya juga dapat dibagi menjadi penelitian pengungkapan mandatory dan voluntary, dan penelitian yang menguji jenis-jenis pengungkapan tertentu, seperti pengungkapan keuangan, pengungkapan tanggung jawab social, pengungkapan lingkungan, dll. Penelitian ini menyelidiki satu jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan good corporate governance (GCG) dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini meneliti pengaruh dari pengungkapan GCG terhadap nilai pasar perusahaan. Penerapan GCG dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Pertanyaan ini dapat ditemukan dalam berbagai codes of corporate governance hampir di semua Negara. Misalnya, Dey Report (1994) dalam Labelle (2002) mengemukakan bahwa “corporate governance yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham namun juga untuk kepentingan publik secara umum”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pedoman yang disusun oleh KNKCG (2001) di Indonesia. KNKCG mengemukakan bahwa pedoman GCG yang mereka susun antara lain bertujuan untuk “memaksimalkan nilai perseroan dan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas,” (butir1) serta untuk “mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan, efisien,” (butir2).

Hasil dari survey McKinsey dan KIOD yang dilakukan di tahun 2003 menunjukkan bahwa rata-rata premium yang rela dibayarkan oleh investor untuk

perusahaan dengan *corporate governance* yang baik di Indonesia adalah 25%. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata premium yang rela dibayarkan oleh investor pada negara-negara di Asia lainnya, seperti Malaysia (22%), Filipina (22%), Jepang (21%), Thailand (20%). Berdasarkan survey tersebut, maka akan menarik untuk diteliti apakah di Indonesia, investor benar-benar bersedia membayar premium kepada perusahaan yang telah menerapkan GCG dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan, sebagai salah satu sumber utama informasi mengenai perusahaan. Premium tersebut dapat dilihat dengan harga yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika, ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang menerapkan dan memberi pengungkapan GCG juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan atau mengungkapkan praktek GCG mereka. Nilai pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Tobin's Q.

Penelitian mengenai good corporate governance telah banyak dilakukan. Black dkk (2003) menemukan bahwa investor menilai earnings yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang menerapkan GCG dengan lebih baik. Labelle (2002) menemukan bahwa pengungkapan atas penerapan good corporate governance berhubungan positif dengan kinerja perusahaan di mata investor. Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Chong dan Silanes (2006) menemukan bahwa perusahaan dengan *corporate governance* yang lebih baik memiliki nilai Tobin's Q dan Price-Book value yang lebih tinggi. Jaafar dan El-Shawa (2009) menemukan bahwa *multiple*

directorship dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q.

Kusumawati dan Riyanto (2005) menemukan bahwa tingkat transparansi *good corporate governance* dan jumlah komisaris berpengaruh positif dengan nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi Kusumawati dan Riyanto (2005), yang berjudul "Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja". Penelitian tersebut menganalisis pengaruh tingkat transparansi GCG, ukuran dewan komisaris dan *cross-directorship* dewan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan market-to-book ratio. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang listing di BEJ pada tahun 2002. Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2002. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat transparansi GCG dan jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan, sedangkan tingkat *cross-directorship* dewan berpengaruh negatif terhadap nilai pasar perusahaan.

Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris, sedangkan nilai perusahaan diukur dengan Tobin's Q. Periode pengamatan yang digunakan yaitu tahun 2010 sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Diharapkan dengan metode pengukuran yang berbeda atas variabel penelitian dan periode pengamatan sampel yang lebih baru maka hasil pengujian penelitian ini akan lebih sesuai dan akurat.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka topik penelitian ini berjudul:
”Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan Pada Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI ”

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi nilai pasar perusahaan?
2. Apakah pengaruh Pengungkapan GCG terhadap nilai pasar perusahaan?
3. Apakah pengaruh ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah pengaruh tingkat transparansi terhadap nilai pasar perusahaan?
5. Apakah pengaruh jumlah komisaris terhadap nilai pasar perusahaan?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 untuk meneliti pengaruh tingkat transparansi dan ukuran dewan komisaris terhadap nilai pasar perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat transparansi mempengaruhi nilai pasar perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi nilai pasar perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat transparansi GCG terhadap nilai pasar perusahaan.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap nilai pasar perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis: dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh transparansi GCG, jumlah dewan komisaris terhadap nilai pasar perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya: dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.